



RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

BAPPENDA
RENJA
RENJA
RENJA
RENJA
RENJA

BAPPENDA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Majapahit No. 17
Telp. 0370-631502; 631274,
Fax. 0370-641151
Mataram (83117)

www.bappenda.ntbprov.go.id
[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)
[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)
bappenda@ntbprov.go.id



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

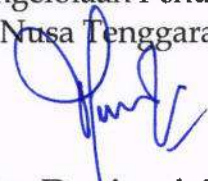
PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala, karena berkat Rahmat dan Karunia serta Perkenan-Nya, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu RKPD Provinsi NTB Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026 yang merupakan Rencana Pembangunan Daerah Transisi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) serta berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB Tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Bappenda Provinsi NTB yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator kinerja dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 dan semoga bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola yang baik (*good governance*).

Mataram, Juli 2024
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Hj. Eva Dewiyani, SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701210 199803 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 52
 BAB V PENUTUP	 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022	20
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	38
Tabel 3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
Tabel 3.2	Tujuan Dan Sasaran Bappenda Provinsi NTB	41
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	43
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah Rencana Kerja Prioritas Perangkat Daerah	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat berakhir pada tanggal 18 September 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023
13. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sementara tujuan disusunnya Renja ini sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika dokumen OPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

Bab V Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Aspek Pendapatan	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	38,65	35,45	36,97	43,23	116,93	38,65	47,78	123,63
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai	85,00 (A)	81,14 point (A)	82,83	81,17	98,00	85,50	81,20	94,97
5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	Persen	100,00	99,66	100,00	94,62	94,62	100,00	38,96	38,96
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen	2	2	2	2	91,01	2	1	51,53
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Dokumen	1	1	1	1	99,62	1	1	100,00

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	1	1	1	1	99,08	1	1	61,25
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	1	0	1	1	98,71	1	1	77,58
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA)	Dokumen	1	1	1	1	91,04	1	1	100,00
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen	1	1	1	1	92,40	1	1	54,48
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	Dokumen	2	2	2	2	94,36	2	1	42,13
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Persen	>90	92,04	90	98,32	109,24	92,50	55,45	59,94
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, Non ASN	Orang	370	370	370	370	100,00	370	371	100,34

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Dokumen	25.000	13.644	22.000	21.578	98,08	25.000	13.691	54,76
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	11	11	11	11	97,03	11	11	97,54
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Dokumen	2	1	2	2	93,12	2	2	94,62
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	Dokumen	18	13	18	17	95,09	18	15	85,75
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen	12	9	12	4	33,09	12	8	68,41
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	Persen	85,00	63,90	85,00	93,15	109,59	85,00	58,93	69,33
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	22	34	22	2	8,61	22	10	43,34

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	33	26	33	10	31,21	33	23	68,60
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen	1	1	1	1	84,97	1	1	82,77
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	2,09	24,91	2,24	0,63	28,17	1,21	0,41	34,06
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rp.	48,78	33,57	47,69	34,07	71,42	48,78	23,76	48,70
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	Paket	2	2	2	2	100,00	2	1	50,00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	2	4	4	100,00	4	1	28,75
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	15,00	6,55	13,5	11,43	84,70	100,00	42,58	42,58

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	Kali	220	107	220	59,62	27,10	220,00	95,61	43,46
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	85,59	1	1	66,77
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	12	11	89,76	12	3	22,29
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Orang	5	0	7	4	57,14	5	2	47,93
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah	Paket	2	0	3	2	66,67	2	0	0,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Persen	100,00	91,01	100	89,51	89,51	100,00	40,78	40,78

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jenis	265	193	258	248	96,28	265	193	72,70
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	300	243	18	17	94,74	300	0	0,06
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	10	10	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	125	99	75	73	97,82	125	94	75,00
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	145	90	131	98	75,07	145	53	36,71
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	45	23	45	38	84,94	45	27	59,28
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tahun	1	1	1	1	99,95	1	1	68,72
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	Kali	150	126	120	110	91,67	150	123	82,00
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	Berkas	44000	20	18.000	16.925	94,03	24.000	9.000	37,50

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	Kunjungan	22.000	53.593	65.000	57.366	88,26	22.000	24.663	112,10
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Persen	100,00	83,58	100	93,06	93,06	100,00	24,04	24,04
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional tersedia	Unit	1	0	2	2	96,55	1	0	0,00
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Buah/ Set	45	25	14	14	98,32	45	0	0,00
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit/ Paket	25	16	34	32	94,07	25	24	97,70
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket	6	7	8	6	78,73	6	0	0,00
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	0	0	0	0,00	1	0	0,00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen	100,00	69,23	100	84,89	84,89	100,00	48,86	48,86

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	Surat	12.500	7.900	11.038	9.311	84,36	11.038	5.267	47,72
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	4	3	4	3	78,45	4	3	66,26
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya	Orang	271	249	417	413	99,01	417	329	78,95
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Persen	100,00	77,27	100	91,78	91,78	100,00	61,57	61,57
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	1	1	1	1	92,62	1	0,4	42,97
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	189	154	38	37	98,16	38	28	73,41

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel dan perlengkapannya yang dipelihara	Unit	0	0	5	2	49,28	0		#DIV/0!
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	275	180	250	207	82,74	250	175	70,17
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	Paket	25	12	22	22	98,35	22	9	38,83
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab	Unit	134	109	155	143	92,33	134	75	55,68
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi (Persen)		38,44	35,45	48,36	43,23	89,38	38,65	47,78	123,63
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	4,79	2,95	6,16	-0,46	-7,46	12,49	-19,71	-157,80
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	92,46	2	1	27,25
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen	60,54	64,09	51,10	56,17	109,91	49,94	52,22	104,56

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer	Milyar Rp	3.636,96	3.343,95	2.890,08	2.937,45	101,64	2.978,81	2.223,01	74,63
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	54,03	50,56	59,60	53,36	89,53	54,03	54,77	101,36
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	9,59	4,01	21,11	21,37	101,24	9,91	-11,24	-113,46
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	1.838,44	1.418,22	1.766,56	2.717,64	153,84	2.032,21	2.271,47	111,77
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Rekomendasi kesamsatan;	Rekomen	4	2	5	3	64,56	5	2	47,63

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
		Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Draft	7	10	13	13	100,00	13	11	84,62
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	Kali	150	87	64,20	54,55	84,97	66,86	37,25	55,71
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan	Paket	12	10	6	5	91,29	12	8	64,90
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor	Obyek	1.918.415	876.876	1.140.349	968.927	84,97	1.126.416	667.254	59,24
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	1.850.000	949.144	1.700.000	1.065.723	62,69	1.800.000	753.366	41,85
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	95.382	91.703	121.924	96.796	79,39	102.030	86.112	84,40

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi	Orang	15.500	10.940	12.000	10.200	85,00	10.000	7.500	75,00
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	10	7	178.229	144.826	81,26	178.229	86.810	48,71
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T); Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	Obyek Obyek	65.850	79.740	65.850	60.170	91,37	41.625	180.314	433,19
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya;	Obyek	26.950	27.169	26.950	25.100	93,14	27.409	13.488	49,21

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Traget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2027	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12-(11/5)
		Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100,00	2	2	100,00
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Data Potensi Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	2	1	2	2	100,00	2	2	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas fungsinya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai implementasi visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, yang dalam hal ini mendukung misi ke-2 yakni Bersih Dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

Sesuai Renstra Bappenda Tahun 2019-2023, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi NTB adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappenda Provinsi NTB beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target RENSTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2022
1.	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (%)	-	-	34,06	35,41	36,97	38,65	35,09	35,45	43,23	38,65
2.	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (milyar)			5.049,03	5.739,96	5.796,56	6.073,97	5.174,59	5.326,93	5.042,21	6,073,97
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)			51,66	54,82	58,12	62,45	54,06	55,31	75,38	63,46
4.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)					9,08	9,59			21,37	9,59
5.	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (%)			85,00	88,50	92,50	97,50	85,27	82,15	87,79	97,50
6.	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (%)					63,64	66,33			51,04	66,33s

Sumber data: LKjIP Tahun 2022, data diolah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi isu penting yang mempengaruhi tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah setyaitu implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disusun sebagai upaya penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: **pertama** mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, **kedua** mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan pembiayaan utang daerah, **ketiga** mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta **keempat** harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Isu penting lainnya yaitu Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terus dilakukan dengan elektrofikasi transaksi atau transaksi digital disemua sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sementara jenis penerimaan yang sudah melakukan transaksi digital yaitu dengan memperbanyak layanan berbasis digital seperti QRIS, EDC, serta *Payment Point Online Bank* (PPOB). Melakukan validasi data kendaraan terhadap obyek pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pajaknya dan sudah jatuh tempo pembayarannya diatas 2 (dua) tahun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 disusun mengakomodir peraturan pemerintah pusat, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Secara terinci program, kegiatan dan subkegiatan sesuai rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel 3 di bawah.

Rancangan awal RKPD 2024 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun dalam rancangan RKPD 2024 Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB mengakomodir 3 program, 12 kegiatan, dan 66 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp119.731.326.283,- terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu indikatif Rp 112.721.842.891,-, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif Rp204.147.023,- serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif Rp6.805.336.369,-.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	85,00 Persen	112.721.842.891	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan perasional perkantoran	85,00 Persen	130.099.699.320
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	457.828.041	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	459.712.664
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	101.012.664	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	101.012.664
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	44.522.723	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	43.910.000
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	44.522.724	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	45.210.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD		
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	14.555.506	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	14.560.000
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	14.555.504	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	15.760.000
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	99.097.307	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1	99.700.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	139.561.613	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	139.560.000
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	92,50 Persen	83.847.571.304	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	92,50 Persen	94.988.364.493
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	83.019.513.596	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	94.160.290.679
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	25.000.000
01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	539.666.814	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	539.666.814

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	64.961.534	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	64.970.000
01.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	40.199.605	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	40.200.000
01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	92.643.179	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18	92.650.000
01.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	65.586.576	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	65.587.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85,00 Persen	399.855.496	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85,00 Persen	409.988.342
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	227.866.259	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	228.000.000
01.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	133.270.895	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	143.270.000
01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	38.718.342	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	38.718.342
01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,60 Persen	210.012.249	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,60 Persen	225.011.000
01.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	92.206.763	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	94.206.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	55.027.486	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	65.027.000
01.04.03	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	62.778.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	65.778.000
01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	355.725.833	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	1,50 Persen	370.426.000
01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	168.675.659	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	171.600.000
01.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	55.654.405	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	56.650.000
01.05.03	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	64.216.624	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	65.216.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	32.587.795	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	33.060.000
01.05.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	34.591.350	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	43.900.000
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5.761.429.807	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	6.103.691.821
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	192.641.305	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	193.409.600
01.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98	1.206.938.556	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	98	1.384.448.621
01.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22	942.648.629	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22	1.050.993.600

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	95.896.821	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	96.600.000
01.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	740.922.816	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	745.770.000
01.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.030.187.080	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2.068.900.000
01.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	42.194.600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	41.620.000
01.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	510.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	521.950.000
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	3.036.408.466	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	7.134.980.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	580.000.000
01.07.02	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	265.428.702	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	320.000.000
01.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	629.322.890	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	394.620.000
01.07.04	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	94.184.378	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	140.060.000
01.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1.440.606.010	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5.700.000.000
01.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	256.866.486	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	300.000
01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	15.299.635.738	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	16.707.476.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	93.122.663	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	113.565.000
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.249.027.117	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.599.903.000
01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	11.957.485.958	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12.994.008.000
01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	3.353.375.957	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	3.700.049.000
01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	1.923.904.292	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	2.189.250.000
01.09.03	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	42.811.081	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	15.060.000
01.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	564.250.047	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	467.190.000
01.09.05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	94.184.378	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	100.060.000
01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	690.382.835	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	878.355.000
01.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	12.843.324	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	25.134.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	52,82 Persen	204.147.023	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	52,82 Persen	217.000.000
02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	(9,7) Persen	112.147.023	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	(9,7) Persen	117.000.000
02.01.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	112.147.023	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	117.000.000
02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer	(4,5) Persen	92.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer	(4,5) Persen	100.000.000
02.02.01	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	92.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	100.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.805.336.369	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8.685.251.013
03.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				6.805.336.369	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				8.685.251.013
03.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	299.709.944	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	417.300.000
03.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	238.521.523	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	264.170.000
03.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	194.556.511	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	210.456.000
03.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	791.812.143	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	801.680.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	593.640.982	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	810.950.000
03.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	127.475.874	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	216.960.000
03.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.345.918.607	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	2.086.660.000
03.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	11	112.428.055	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	11	40.174.000
03.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	25.495.175	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	28.010.000
03.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12	555.160.264	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12	656.971.013

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1	28.327.972	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1	14.810.000
03.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.228.141.417	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.825.760.000
03.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	214.147.902	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	218.460.000
03.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	50.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	92.890.000

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi NTB

Dalam renja perangkat daerah tahun 2024 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2024 tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pemerintah dalam Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Pemberlakuan pajak rokok elektrik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018.

Tabel 3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengenaan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik	Kementrian Keuangan RI	Meningkatkan penerimaa PAD yang bersumber dari Pajak Rokok

Dengan terbitnya UU-HKPD diharapkan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien serta mengatur tata kelola hubungan keuangan yang adil, selaras, dan akuntabel. UU HKPD bertujuan untuk mengatur mengenai pola alokasi belanja negara yang disalurkan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, pengendalian APBD, dan pengelolaan perpajakan di daerah dengan harapan dapat membuka ruang bagi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desentralisasi fiskal. Undang-undang ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka penyesuaian dan persiapan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai UU-HKPD, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mempersiapkan regulasi pendukung berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terutama yang terkait dengan rencana penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Opsi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang akan diberlakukan pada tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Perangkat Daerah Bappenda Provinsi NTB dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
1	2	3	4	6
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah	1.1 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	2.546,86
			1.1.2 Persentase Peningkatan PAD (Persen)	-14,69
		1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	92,50
			1.2.2 Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Objek)	9.578

Sumber data: Dokumen Renstra Bappenda Provinsi NTB 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2024 merumuskan dan merencanakan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam 3 Program 12 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan beserta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun rencana 2024 maupun prakiraan maju tahun 2025, hal ini terinci dalam tabel 7.

Dalam rangka meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, Bappenda di awal priode berencana membangun

kantor layanan Samsat Praya yang berlokasi di kota Praya. Permasalahan yang terjadi lokasi kantor yang ada saat ini yang dirasa kurang representatif dimana saat hujan terjadi genangan air atau banjir saat musim hujan tiba.

Kantor ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat dalam transaksi pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang lebih memadai dan efisien, termasuk area tunggu yang nyaman, sistem antrian yang lebih teratur, serta pelayanan yang lebih cepat dan ramah. Pembangunan tersebut dialokasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran		85%	127.031.709.250			90%	127.127.593.520
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja		100%	372.220.000			100%	289.538.000
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	1 Dokumen	88.920.000	DAU		1	106.798.000
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda NTB	1 Dokumen	43.910.000	DAU		1	43.910.000
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Bappenda NTB	1 Dokumen	45.210.000	DAU		1	45.210.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappenda NTB	1 Dokumen	8.160.000	DAU		1	8.160.000
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappenda NTB	1 Dokumen	8.760.000	DAU		1	8.760.000
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Bappenda NTB	12 Laporan	76.700.000	DAU		1	76.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	100.560.000	DAU		2	100.560.000
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		92,50 Persen	99.917.427.879			93,50 Persen	94.220.969.949
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	370 Orang/Bulan	99.160.290.679	DAU/PAD		360	93.454.172.749
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	2 Dokumen	447.397.200	DAU		1	5.100.000
01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	750 Dokumen	122.640.000	DAU		5.485	574.597.200
01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	1 Laporan	51.240.000	DAU		1	51.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappenda NTB	2 Dokumen	26.560.000	DAU		2	26.560.000
01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda NTB	18 Laporan	56.040.000	DAU		18	56.040.000
01.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	4 Dokumen	53.260.000	DAU		12	53.260.000
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	85%	85,00 Persen	355.794.550			85,00 Persen	355.794.550
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	2 Dokumen	76.902.750	DAU		22	76.902.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	2 Laporan	66.536.800	DAU		22	66.536.800
01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	2 Laporan	212.355.000	DAU		1	212.355.000
01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		0,60 Persen	135.890.000			0,71 Persen	135.890.000
01.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	2 Dokumen	75.710.000	PAD		1	75.710.000
01.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	1 Dokumen	4.120.000	PAD		1	4.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.04.03	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	2 Laporan	56.060.000	PAD		4	56.060.000
01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya		1,50 Persen	343.560.000			1,50 Persen	343.560.000
01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	24 Unit	171.600.000	DAU		220	171.600.000
01.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	4 Dokumen	41.000.000	DAU		11	41.000.000
01.05.03	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	12 Dokumen	55.000.000	DAU		11	55.000.000
01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappenda NTB	7 Orang	32.060.000	DAU		15	32.060.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.05.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	100 Orang	43.900.000	DAU		100	43.900.000
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD		100 Persen	5.142.691.821			100 Persen	5.258.999.821
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappenda NTB	26 Paket	120.409.600	DAU		30	120.409.600
01.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappenda NTB	112 Paket	1.404.448.621	DAU		125	1.429.256.621
01.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappenda NTB	18 Paket	1.050.993.600	DAU		120	1.101.843.600
01.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Bappenda NTB	6 Dokumen	96.600.000	DAU		45	96.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Undangan yang Disediakan							
01.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	12 Laporan	745.770.000	DAU		2.030	745.770.000
01.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	12 Laporan	1.168.900.000	DAU		12	1.216.800.000
01.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	500 Dokumen	33.620.000	DAU		4	33.620.000
01.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	12 Dokumen	521.950.000	DAU		1	514.700.000
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang		100 Persen	811.600.000			100 Persen	4.024.459.200
01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	1 Unit	276.080.000	DAU		1	622.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
		Lapangan yang Disediakan							
01.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappenda NTB	2 Paket	120.000	DAU		25	694.665.200
01.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappenda NTB	8 Unit	394.620.000	DAU		20	385.320.000
01.07.04	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Bappenda NTB	2 Unit	140.060.000	DAU		6	140.360.000
01.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda NTB	1 Unit	420.000	DAU		1	5.700.000.000
01.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda NTB	1 Unit	300.000	DAU		7	41.194.000
01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD		100 Persen	16.277.476.000			100 Persen	16.937.289.000
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	12 Laporan	113.565.000	DAU		11	271.540.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappenda NTB	12 Laporan	3.599.903.000	DAU		4	3.478.053.000
01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappenda NTB	12 Laporan	12.564.008.000	DAU		12	13.187.696.000
01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD		100 Persen	3.675.049.000			100 Persen	5.561.093.000
01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bappenda NTB	1 Unit	25.000.000	DAU		1	25.000.000
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappenda NTB	25 Unit	2.289.250.000	DAU		100	2.289.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
01.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bappenda NTB	10 Unit	15.060.000	DAU		189	15.060.000
01.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappenda NTB	23 Unit	467.190.000	DAU		15	487.570.000
01.09.05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Bappenda NTB	10 Unit	75.060.000	DAU		12	75.060.000
01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda NTB	2 Unit	778.355.000	DAU		11	2.342.945.000
01.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda NTB	1 Unit	25.134.000	DAU		11	326.208.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah		52,82 Persen	157.820.000			55,94 Persen	157.820.000
02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah		(9,7) Persen	89.360.000			(5,47) Persen	89.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
02.01.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	2 Dokumen	89.360.000	PAD		2	89.360.000
02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer		(4,50)	68.460.000			0,46	68.460.000
02.02.01	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	2 Dokumen	68.460.000	DAU		2	68.460.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK		50,34 Persen	8.540.489.000			47,19 Persen	9.991.483.000
03.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		(14,87) Persen	8.540.489.000			(11,72) Persen	9.991.483.000
03.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	6 Dokumen	417.300.000	PAD		4	417.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
03.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	2 Laporan	264.170.000	PAD		2	274.170.000
03.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	154.560.000	PAD		12	179.560.000
03.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	20 Sarana dan Prasarana	801.680.000	PAD		100	1.463.080.000
03.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	810.950.000	PAD		12	1.310.950.000
03.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	216.960.000	PAD		12	216.960.000
03.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bappenda NTB	12 Dokumen Ketetapan	1.986.660.000	PAD		12	1.885.260.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
03.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Bappenda NTB	12 Laporan	40.174.000	PAD		12	36.308.000
03.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	12 Dokumen	8.010.000	PAD		4	8.010.000
03.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Bappenda NTB	11000 dokumen	688.105.000	PAD		12	678.105.000
03.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Bappenda NTB	1 Dokumen	14.810.000	PAD		1	14.810.000
03.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	40 Laporan	2.825.760.000	PAD		40	3.195.620.000
03.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	218.460.000	PAD		2	218.460.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
03.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	12 Laporan	92.890.000	PAD		1	92.890.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB lebih mengacu kepada memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sebagai Perangkat Daerah selaku koordinator pengelola pendapatan daerah, Bappenda Provinsi NTB juga memiliki tugas sebagai Perangkat Daerah teknis yang melakukan pemungutan langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung upaya tersebut maka dibutuhkan sumber daya berupa pendanaan terkait dengan biaya operasional pemungutan pajak daerah serta peremajaan infrastruktur peralatan Kesamsatan, berupa peralatan teknis dan jaringan internet. Disamping itu perlu dilakukan adanya dukungan infrastruktur bangunan gedung berupa raung pelayanan wajib pajak dan ruang kerja petugas yang nyaman.

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 mengacu pada RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari 3 program 12 kegiatan dan 66 sub kegiatan, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran			85,00 Persen	127.031.709.250	
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja			100 Persen	372.220.000	
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	88.920.000	Bappenda NTB
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	43.910.000	Bappenda NTB
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	45.210.000	Bappenda NTB
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	8.160.000	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	8.760.000	Bappenda NTB
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	76.700.000	Bappenda NTB
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	100.560.000	Bappenda NTB
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		Kota Matara	92,50	95.757.427.879	
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Kota Mataram	370 Orang/ Bulan	99.160.290.679	Bappenda NTB
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aparatur	Kota Mataram	2 Dokumen	447.397.200	Bappenda NTB
01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Aparatur	Kota Mataram	750 Dokumen	122.640.000	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aparatur	Kota Mataram	1 Laporan	51.240.000	Bappenda NTB
01.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Aparatur	Kota Mataram	2 Dokumen	26.560.000	Bappenda NTB
01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Aparatur	Kota Mataram	18 Laporan	56.040.000	Bappenda NTB
01.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Aparatur	Kota Mataram	4 Dokumen	53.260.000	Bappenda NTB
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi			85,00%	355.794.550	
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Aparatur	Kota Mataram & Kab/Kota	2 Dokumen	76.902.750	Bappenda NTB
01.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Aparatur	Kota Mataram & Kab/Kota	2 Laporan	66.536.800	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Milik Daerah pada SKPD					
01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur	Kota Mataram & Kab/Kota	2 Laporan	212.355.000	Bappenda NTB
01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah			0,60	135.890.000	
01.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Aparatur	Kota Mataram	2 Dokumen	75.710.000	Bappenda NTB
01.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Aparatur	Kota Mataram	1 Dokumen	4.120.000	Bappenda NTB
01.04.03	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Aparatur	Kota Mataram	2 Laporan	56.060.000	Bappenda NTB
01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Kota Mataram	1,50 Persen	343.560.000	
01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Aparatur	Kota Mataram	24 Unit	171.600.000	Bappenda NTB
01.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Aparatur	Kota Mataram	4 Dokumen	41.000.000	Bappenda NTB
01.05.03	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Aparatur	Kota Mataram	12 Dokumen	55.000.000	Bappenda NTB

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur	Kota Mataram	7 Orang	32.060.000	Bappenda NTB
01.05.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Kota Mataram	100 Orang	43.900.000	Bappenda NTB
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD			100 Persen	5.142.691.821	
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Induk dan UPPD	Kota Mataram	26 Paket	120.409.600	Bappenda NTB
01.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Induk dan UPPD	Kota Mataram	112 Paket	1.404.448.621	Bappenda NTB
01.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Induk dan UPPD	Kota Mataram	18 Paket	1.050.993.600	Bappenda NTB
01.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	6 Dokumen	96.600.000	Bappenda NTB
01.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	745.770.000	Bappenda NTB
01.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	1.168.900.000	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.07	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Aparatur	Kota Mataram	500 Dokumen	33.620.000	Bappenda NTB
01.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aparatur	Kota Mataram	12 Dokumen	521.950.000	Bappenda NTB
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang		Kota Mataram	100 Persen	4.971.600.000	
01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	1 Unit	276.080.000	Bappenda NTB
01.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	2 Paket	260.120.000	Bappenda NTB
01.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	8 Unit	394.620.000	Bappenda NTB
01.07.04	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	2 Unit	140.060.000	Bappenda NTB
01.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	1 Unit	3.900.420.000	Bappenda NTB
01.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	1 Unit	300.000	Bappenda NTB

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD			100 Persen	16.277.476.000	
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	113.565.000	Bappenda NTB
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	3.599.903.000	Bappenda NTB
01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	12.564.008.000	Bappenda NTB
01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD			100 Persen	3.675.049.000	
01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Kota Mataram	1 Unit	25.000.000	Bappenda NTB
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Mataram	25 Unit	2.289.250.000	Bappenda NTB
01.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kota Mataram	10 Unit	15.060.000	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Mataram	23 Unit	467.190.000	Bappenda NTB
01.09.05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Kota Mataram	10 Unit	75.060.000	Bappenda NTB
01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Mataram	2 Unit	778.355.000	Bappenda NTB
01.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Mataram	1 Unit	25.134.000	Bappenda NTB
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah			52,82 Persen	157.820.000	
02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah			(9,7) Persen	89.360.000	
02.01.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Aparatur	Kota Mataram	2 Dokumen	89.360.000	Bappenda NTB
02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer		Kota Mataram	(4,50) Persen	68.460.000	
02.02.01	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Aparatur	Kota Mataram	2 Dokumen	68.460.000	Bappenda NTB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Lainnya					
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK			50,34 Persen	8.540.489.000	
03.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah			(14,87) Persen	8.540.489.000	
03.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur	Kota Mataram	6 Dokumen	417.300.000	Bappenda NTB
03.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Aparatur	Kota Mataram	2 Laporan	264.170.000	Bappenda NTB
03.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Aparatur & Masyarakat	Kota Mataram	12 Laporan	154.560.000	Bappenda NTB
03.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aparatur	Kota Mataram	20 Sarana dan Prasarana	801.680.000	Bappenda NTB
03.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak & Masyarakat	Kota Mataram	12 Laporan	810.950.000	Bappenda NTB

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perangkat daerah Penanggung jawab
			Sasaran	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
03.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Aparatur	Kota Mataram	12 Laporan	216.960.000	Bappenda NTB
03.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak & Subyek Pajak	Kota Mataram	12 Dokumen Ketetapan	1.986.660.000	Bappenda NTB
03.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Wajib Pajak, Subyek Pajak, dan Masyarakat	Kota Mataram	12 Laporan	40.174.000	Bappenda NTB
03.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Aparatur	Kota Mataram	12 Dokumen	8.010.000	Bappenda NTB
03.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Wajib Pajak & Subyek Pajak	Kota Mataram	11000 WP	688.105.000	Bappenda NTB
03.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Wajib Pajak, Subyek Pajak, dan Masyarakat	Kota Mataram	1 Dokumen	14.810.000	Bappenda NTB
03.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Aparatur, Wajib Pajak, dan Subjek Pajak	Kota Mataram	40 Laporan	2.825.760.000	Bappenda NTB
03.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Aparatur, Wajib Retribusi, dan Subjek Retribusi	Kota Mataram	12 Laporan	218.460.000	Bappenda NTB
03.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Aparatur & e-commers	Kota Mataram	12 Laporan	92.890.000	Bappenda NTB

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renja Tahun 2024 ini merupakan Renja tahun pertama yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026 merupakan Rencana Pembangunan Daerah Transisi karena Gubernur dan Wakil Gubernurnya berakhir pada tanggal 18 September 2023, serta berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terciptanya komunikasi antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta dokumen ini juga menjadi acuan dalam proses penyusunan RKA maupun penetapan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.